

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN BAGI HASIL
DALAM TERNAK AYAM PELUNG**

**(Studi di Kelurahan Pasir Gintung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota
Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Ade Hani Fishesa

1721030002



Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

1442H/2021

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PELAKSANAAN BAGI HASIL
DALAM TERNAK AYAM PELUNG**

**(Studi Di Kelurahan Pasir Gintung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota
Bandar Lampung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.1) Dalam Bidang Hukum Ekonomi
Syari'ah (Muamalah)

Oleh

Nama : Ade Hani Fishesa

NPM : 1721030002

Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Pembimbing I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H.,S.Ag.,M.H.

Pembimbing II : Anis Sofyana M.S.I

**FAKULTAS SYARAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442H/2021**

ABSTRAK

Pelaksanaan bagi hasil dalam ternak ayam pelung, yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Pasir Gintung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung diawali dengan akad atau perjanjian yang dilakukan secara lisan yang terdiri dari pemilik, admin ternak ayam pelung, dua pengelola, dan pengantar pesanan ayam pelung bahwa dalam akad perjanjian ini pemilik menyerahkan modal dalam bentuk 3 ekor ayam pelung, dengan fasilitas kandang dan biaya perawatan ternak ayam pelung dari pengelola dengan catatan biaya perawatan akan diganti sesuai dengan dana yang sudah dikeluarkan oleh pihak pengelola yang diambil dari hasil terjualnya ayam pelung serta resiko kematian ditanggung antara pihak pemilik dan pengelola. Pelaksanaan bagi hasil dalam ternak ayam pelung ini dilakukan setelah ayam terjual selama satu tahun, dengan akad perjanjian bahwa pembagian keuntungan dalam pelaksanaan bagi hasil dalam ternak ayam pelung dilakukan setelah ayam terjual, baru dapat ditentukan berapa besar keuntungannya.

Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu Bagaimana pelaksanaan bagi hasil dalam ternak ayam pelung di Kelurahan Pasir Gintung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung ? dan Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan bagi hasil dalam ternak ayam pelung di Kelurahan Pasir Gintung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung ?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitiannya adalah deskriptif. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi sehingga akan didapatkan data penelitian, yang kemudian data tersebut diolah menggunakan teknik analisis kualitatif dengan metode berfikir induktif.

Data lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan bagi hasil dalam ternak ayam pelung, belum sesuai dengan konsep Islam, karena yang pertama yaitu nisbah bagi hasil tidak ditentukan dengan jelas pada saat melakukan akad, kedua, dalam penggantian biaya perawatan tidak sesuai dengan akad diawal, dan ketiga resiko kerugian ditanggung bersama, akan tetapi dalam praktiknya masih ditanggung oleh pihak pengelola, sehingga dalam hal ini belum sesuai dengan hukum Islam.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Sekretariat: Jl. Letkol Hendro Suratin, Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721) 7032889

PERSETUJUAN

Nama : Ade Hani Fishesa
NPM : 1721030002
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah
**Judul : Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Bagi Hasil
Dalam Ternak Ayam Pelung, (Studi di Kelurahan Pasir
Gantung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar
Lampung)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang
munaqasah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.
NIP.197111061998032005

Anis Sofiana, M.S.I.
NIP. 198910252019032009

Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

Khoirudin, M.S.I.
NIP. 19780725200911002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Sekretariat: Jl. Letkol Hendro Suratmin, Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721) 7032889

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Ternak Ayam Pelung”** (Studi Kasus di Kelurahan Pasir Gintung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung) disusun oleh, Ade Hani Fishesa, NPM: 1721030002, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari Kamis, 17 Juni 2021.

TIM PENGUJI

Ketua : Khoiruddin, M.S.I. (.....)

Sekretaris : Abuzar Alghifari, S.Ud., M.Ag. (.....)

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag. (.....)

Penguji II : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H. (.....)

Penguji III : Anis Sofiana, M.S.I. (.....)



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari’ah**

Dr. H. Khoiruddin, M.H.
NPM. 170210221993031002

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا
اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”. “(Q.S Al.Maidah (5):2)

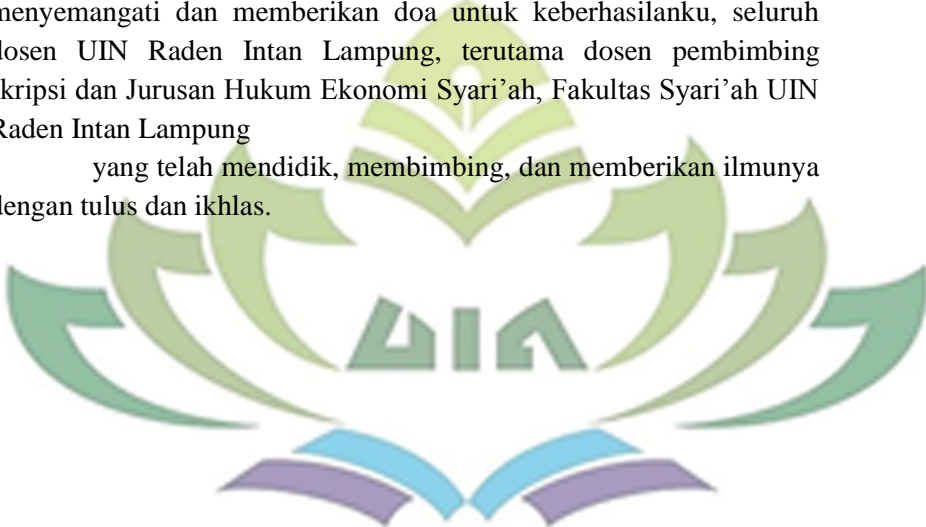


PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah swt, alhamdulillah atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Sebuah karya ilmiah skripsi telah selesai, dengan penuh perjuangan dan kupersembahkan skripsi ini kepada bapak dan ibu tercinta (Adenanling dan Evi Hayati) yang dengan sabar, tulus, ikhlas, dan penuh kasih sayang, selalu memberikan dorongan dan doa restu untuk keberhasilan ku dalam menyelesaikan skripsi ini. Saudara sekandungku tersayang (Ade Febriansyah, Ade Vidianti, Ade Mareta Handayani, Ade Harritsa Viola) yang selalu menyemangati dan memberikan doa untuk keberhasilanku, seluruh dosen UIN Raden Intan Lampung, terutama dosen pembimbing skripsi dan Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

yang telah mendidik, membimbing, dan memberikan ilmunya dengan tulus dan ikhlas.



RIWAYAT HIDUP

Ade Hani Fishesa dilahirkan di Kotabumi pada tanggal 01 Maret 1999, anak ke-4 dari pasangan bapak Adenanling dan ibu Evi Hayati. Ade Hani Fishesa memiliki saudara kandung yaitu seorang kakak yang bernama Ade Febriansyah, Ade Vidianti, Ade Mareta Handayani dan adik perempuan yang bernama Ade Harritsa Viola. Adapun riwayat pendidikan Ade Hani Fishesa adalah dimulai dari TK Al-Huda Kotabumi pada tahun 2005-2006, kemudian melanjutkan pendidikan tingkat SD di SDN 04 Gapura Kotabumi pada tahun 2006-2012, kemudian melanjutkan pendidikan tingkat SLTP di SMPN 12 Kotabumi pada tahun 2012-2014, dan melanjutkan pendidikan SLTA di SMAN 01 Kotabumi pada tahun 2014-2017, kemudian pada tahun 2017 di terima sebagai mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, dan mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, di Fakultas Syari'ah, UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 12 Febuari 2021
Yang membuat

Ade Hani Fishesa
NPM. 1721030002

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum.Wr.Wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Ternak Ayam Pelung “(Studi Di Kelurahan Pasir Gintung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung)” dapat terselesaikan. Shalawat beserta salam juga tak lupa saya sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya sampai akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Mua'amalah), fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu syari'ah.

Atas bantuan dan dukungan dari semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa saya haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya, untuk lebih rinci ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Bapak Dr. H. Khairuddin Tahmid, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah Uin Raden Intan Lampung
3. Bapak Khoirudin, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Juhrotul Khulwah,M.,S,I, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (mua'amalah) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
4. Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag.,M.H., selaku pembimbing I dan ibu Anis Sofiyana, M.S.I., selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan dengan penuh rasa tanggungjawab dan ikhlas, sehingga terselesaikan skripsi ini
5. Bapak dan Ibu dosen serta staf pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik penulis

6. Kepala dan pegawai perpustakaan Fakultas Syariah dan Pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Rekan-rekan seperjuangan dalam menuntut ilmu di Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Mua'amalah) angkatan 2017, khususnya *Mua'amalah* kelas C.
8. Almameter Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung tercinta.

Semoga Allah senantiasa memberikan limpahan karunianya dan demi perbaikan selanjutnya penulis memerlukan kritik dan saran yang membangun dengan senang hati penulis akan menerimanya. Akhirnya, hanya kepada Allah saya serahkan segalanya, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dalam pembangunan dan kemajuan ilmu pengetahuan khususnya pada ilmu-ilmu syari'ah. *Wasalamualaikum, Wr.Wb*

Bandar Lampung, 12 Februari 2021

Yang membuat

Ade Hani Fishesa

Npm. 1721030002



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus Penelitian dan Sub Fokus Penelitian	4
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	5
H. Metode Penelitian	8
I. Sistematika Pembahasan	12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad dalam Hukum Islam

1. Pengertian Akad	13
2. Dasar Hukum Akad	13
3. Rukun dan Syarat Akad	14
4. Macam-macam Akad	17
5. Berakhirnya Akad	17
6. Hikmah Akad	18

B. *Syirkah*

1. Pengertian <i>syirkah</i>	18
2. Dasar hukum <i>syirkah</i>	20
3. Rukun dan syarat <i>syirkah</i>	21

4. Macam-macam <i>syirkah</i>	24
5. Pembagian keuntungan dan kerugian dalam <i>syirkah</i>	28
6. Asas-asas muamalah	29
7. Batalnya akad <i>syirkah</i>	31

BAB III DESKRIPSI DAN OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran umum Kelurahan Pasir Gintung	
1. Sejarah berdirinya Kelurahan Pasir Gintung	33
2. Visi dan Misi Kelurahan Pasir Gintung	34
3. Keadaan Geografis Kelurahan Pasir Gintung	34
4. Keadaan Demokratis Kelurahan Pasir Gintung	34
5. Struktur organisasi Kelurahan Pasir Gintung	37
B. Pelaksanaan Bagi hasil dalam Ternak Ayam Pelung Di Kelurahan Pasir Gintung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung	38

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Ternak Ayam Pelung Di Kelurahan Pasir Gintung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung	49
B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Ternak Ayam Pelung	52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Rekomendasi	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pedoman Observasi
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 Surat Keterangan Wawancara Dengan Informan
- Lampiran 4 Blangko Konsultasi Skripsi
- Lampiran 5 Dokumen Pendukung Berupa Foto

DAFTAR TABEL

TABEL

3.1. Jumlah Penduduk Kelurahan Pasir Gintung Menurut Kelompok Usia.....	35
3.2. Jumlah Penduduk Kelurahan Pasir Gintung Menurut Agama Yang Dianut.....	35
3.3. Jumlah Penduduk Kelurahan Pasir Gintung Menurut Jenjang pendidikan.....	36
3.4. Penghasilan produksi ayam pelung	43
3.5. Biaya oprasional ayam pelung.....	44
3.6. Harga ayam pelung	45



DAFTAR GAMBAR

- 3.1. Struktur Organisasi Kelurahan Pasir Gintung 37
3.2. Skema Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Ternak Ayam Pelung.... 39



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan pemahaman mengenai judul skripsi ini dan supaya tidak menimbulkan kekeliruan atau kesalah pahaman, maka perlu dijelaskan secara singkat tentang isitilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul : **“Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Bagi Hasil Dalam Ternak Ayam Pelung”** (Studi di Kelurahan Pasir Gintung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung). Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah :

1. Tinjauan yaitu hasil meninjau ; pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹
2. Hukum Islam adalah ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah SWT berupa aturan dan larangan bagi umat Islam.²
3. Pelaksanaan merupakan suatu tindakan yang dilakukan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara sistematis dan terperinci yang diterapkan dalam suatu kegiatan.
4. Bagi hasil (*syirkah*) adalah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk saling menolong dalam bekerja, pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.³
5. Ternak merupakan suatu kegiatan membudidayakan hewan ternak dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut.⁴
6. Ayam Pelung merupakan ayam lokal dari Cianjur yang mempunyai suara kokoknya yang khas, merdu, besar dan mengalun panjang serta disukai oleh banyak orang.

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, Edisi Kedua, (Jakarta : Balai Pustaka, 1991). h. 1060.

² Abdul Wahaf Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* , (Jakarta : Raja Grafindo, 1994). h. 154.

³ A. Khumedi Jaf'far, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Surabaya : Gemilang Publisher, 2018), h. 145.

⁴ "<https://dosenpertanian.com/pengertian-ternak>", diakses pada jam 19:30, 01 Juli 2020.

Berdasarkan istilah-istilah bagaimana dikemukakan di atas, maka yang dimaksud judul dalam skripsi ini adalah sebuah kajian yang akan memfokuskan kepada tinjauan hukum islam tentang pelaksanaan bagi hasil dalam ternak ayam pelung, di Kelurahan Pasir Gintung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung.

B.Latar Belakang Masalah

Agama Islam mempunyai satu sumber pokok yang tetap yaitu Al-Qur'an, diantara salah satu segi hukum yang terdapat di dalamnya masalah-masalah Hukum Islam membenarkan seorang muslim berdagang atau usaha perseorangan, menggabungkan modal dan tenaga dalam bentuk perkongsian (serikat dagang) kegotongroyongan yang memungkinkan usaha dapat berjalan dengan lancar. Salah satu contoh dalam usaha perkongsian yang dilakukan oleh masyarakat di Indonesia khususnya adalah kerja sama bagi hasil yang sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pemilik modal dan penerima modal.

Adapun salah satu praktik tolong-menolong dalam bermu'amalah yaitu dengan kerjasama (*syirkah*). Secara istilah *syirkah* atau kerjasama adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang di tetapkan berdasarkan perjanjian untuk bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan dan kerugian dalam bagian yang ditentukan atau akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*al-mal*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁵

Praktik pelaksanaan bagi hasil dalam ternak ayam pelung di Kelurahan Pasir Gintung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, dari data yang peneliti dapatkan pelaksanaan bagi hasil dalam ternak ayam pelung

⁵ Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer* , (Bogor : Ghalia Indonesia, 2012), h. 151

diawali dengan akad atau perjanjian yang dilakukan secara lisan yang terdiri dari pemilik, admin ternak ayam pelung, dua pengelola, dan pengantar pesanan ayam pelung bahwa dalam akad perjanjian ini pemilik menyerahkan modal dalam bentuk 3 ekor ayam pelung yang diserahkan kepada pengelola yang terdiri dari 2 betina dan 1 jantan, sedangkan fasilitas dan kandang dari pengelola dan juga biaya perawatan ternak ayam pelung dari pengelola dengan catatan saat pembagian hasil uang ataupun modal biaya perawatan diganti dari hasil pendapatan terjualnya ayam pelung selama satu tahun. Pelaksanaan bagi hasil dalam ternak ayam pelung ini dilakukan setelah ayam terjual selama satu tahun, dengan pembagian keuntungan dalam pelaksanaan bagi hasil dalam ternak ayam pelung dilakukan setelah ayam terjual, baru dapat ditentukan berapa besar keuntungannya. Pihak pemilik mengambil keuntungan dengan tetap memperhitungkan biaya yang sudah dikeluarkan oleh pihak pengelola yaitu sebesar 15%, kemudian sisa dari keuntungan dan modal dari pengelola selama ayam pelung dirawat dengan pihak pemilik diserahkan kepada pihak admin, pihak admin yang akan membaginya secara bersama-sama. Dengan cara menghitung berapa besar dana operasional yang digunakan dalam ternak ayam pelung, lalu dikurangi dengan biaya imbalan sebesar Rp.4000,000 untuk admin Rp.2000,000, dan juga pengantar pesanan Rp.2000,000 yang diambil dari keuntungan yang didapat dari hasil terjualnya ayam pelung, sisa uang itulah merupakan keuntungan bersih untuk pihak pengelola.

Adapun permasalahan dalam judul ini yaitu bahwa sisa uang dari hasil penjualan ayam pelung yang sudah dipotong 15% oleh pihak pemilik tersebut diserahkan kepada admin sehingga adminlah yang membagi uang hasil dari penjualan ayam pelung kepada pengelola dan pengantar pesanan. Ternyata pada saat pelaksanaan bagi hasil tidak sesuai dengan akad atau perjanjian diawal karena dalam praktiknya admin dalam memberi pengelola tidak sesuai dengan biaya perawatan yang sudah dikeluarkan oleh pengelola ayam pelung senilai Rp.22,515,000, akan tetapi hanya diberikan

Rp.22.000,000, sehingga dalam hal ini pihak admin melakukan kecurangan biaya oprasional pakan sebesar Rp.515,000, sehingga pengelola merasa dirugikan. Seharusnya pihak admin dalam proses pembagian hasil ini dilakukan secara musyawarah ataupun bersama-sama agar pembagian hasilnya adil dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Resiko kematian ayam pelung selama masih dalam perawatan ditanggung bersama oleh pemilik dan pengelola, akan tetapi dalam praktiknya pihak pengelola yang menanggung resiko tersebut, sehingga pihak admin dalam pembagian hasil langsung memotong keuntungan pengelola sesuai dengan jumlah ayam yang mengalami kematian saat masih dalam proses perawatan, tanpa sepengetahuan pihak pemilik, seharusnya resiko kematian ayam pelung ditanggung bersama sesuai dengan perjanjian diawal, yang dalam hal ini pihak admin yang memotongnya sebesar Rp. 200,000 dari hasil keuntungan bersih untuk dua pengelola Rp.25,335,000, dengan persentase kecurangan admin sebesar 0, 8%. Seharusnya kedua pihak pengelola menerima 100% keuntungan (Rp.25,335,000), karena admin melakukan kecurangan sebesar 0,8% maka $100\% - 0,8\% = 99,2\%$, jadi setiap pihak pengelola menerima sebesar Rp.49,6%, atau hanya menerima Rp. 10,567,500 untuk satu pengelolanya.

Pembagian hasil ini sangatlah menarik karena pelaksanaan bagi hasil dalam ternak ayam pelung diawali dengan akad atau perjanjian yang dilakukan secara lisan akan tetapi pada praktiknya tidak sesuai dengan akad perjanjian yang diucapkan dan ditemukan satu orang yang melakukan pembagian hasil seperti ini di tempat ternak ayam pelung yang dilakukan oleh admin ternak ayam pelung, Kelurahan Pasir Gintung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung.

C. Fokus Penelitian dan sub-Fokus Penelitian

Peneliti memfokuskan masalah terlebih dahulu supaya tidak terjadi perluasan masalah yang nantinya tidak sesuai dengan penelitian ini. Maka peneliti memfokuskan

untuk meneliti suatu akad kerjasama menggunakan sistem bagi hasil (*Syirkah*) yang diterapkan oleh pemilik dan pengelola ayam pelung.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan bagi hasil dalam ternak ayam pelung di Kelurahan Pasir Gintung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan bagi hasil dalam ternak ayam pelung, di Kelurahan Pasir Gintung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan bagi hasil dalam ternak ayam pelung di Kelurahan Pasir Gintung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang pelaksanaan bagi hasil dalam ternak ayam pelung di Kelurahan Pasir Gintung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat atau signifikansi akademis dan praktis sebagai berikut :

1. Signifikansi Akademis

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan ketajaman tinjauan hukum Islam yang terkait dengan masalah pelaksanaan bagi hasil yang dilihat dari hukum Islam.

2. Signifikansi Praktis

Signifikansi praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemilik dan pengelola ayam pelung untuk meningkatkan komitmen kerjasama dalam menjalankan hak dan kewajiban yang telah disepekatkan berdasarkan hukum Islam.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebelum penulis melangkah lebih jauh dalam membahas permasalahan ini, penulis terlebih dahulu

memilah beberapa karya ilmiah yang ada relevansinya dengan permasalahan yang akan penyusun bahas untuk menghindarkan dari penelitian yang sama dengan satu objek.

Skripsi tahun 2017 oleh Puji Rahmawati yang berjudul “*syirkah* pada pertanian singkong ditinjau dari etika bisnis islam (studi kasus di Desa Mujirahayu Kec. Seputih Agung, Kab. Lampung Tengah). Di dalam skripsi ini membahas tentang *syirkah* pada pertanian singkong ditinjau dari etika bisnis islam bahwa dalam kerjasama *syirkah* yang dilakukan oleh ketiga pasang *syirkah* pada pertanian singkong di Desa Mujirahayu, Kec. Seputih Agung, Kab. Lampung Tengah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam karena tidak mencakup prinsip etika bisnis islam seperti prinsip tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, bertanggung jawab, dan kebenaran karena disini hanya pemilik bibit singkonglah yang mendapat keuntungan lebih dari pada pemilik lahannya. Selain itu dalam pemberian bibit singkong pada pemilik lahan juga tidak sesuai dengan perjanjian pada saat awal akad, sehingga pemilik lahan harus menambah modal lagi untuk mendapat bibit singkong yang cukup, dan dalam melaksanakan kerjasama ini pemilik lahan sedikit terpaksa melanjutkan *syirkah* ini karena pada saat itu adanya kelangkaan bibit singkong yang dijual.”⁶

Skripsi tahun 2017 oleh Putri Adlilla yang berjudul “Implementasi Akad *Syirkah* dalam Perkongsian Jual Beli HP (Suatu Penelitian di Toko HP Peunayong). Di dalam skripsi ini membahas tentang implementasi dari akad *syirkah* terdapat dalam perkongsian jual beli HP (Hand Phone) di toko HP Peunayong. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang bentuk perkongsian jual beli HP di toko HP Peunayong dan ditinjau menurut akad *syirkah*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan metode pengumpulan data dari wawancara, dan dokumentasi, dan penelitian ini bersifat deskriptif analisis.

⁶ Puji Rahmawati, “*Syirkah Pada Pertanian Singkong Ditinjau Dari Etika Bisnis islam (Studi Kasus di Desa Mujirahayu Kec. Seputih Agung, Kab. Lampung Tengah)*”, Skripsi, IAIN Metro, 2017.

Berdasarkan hasil penelitian, bentuk perkongsian jual beli HP di Peunayong dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk, yaitu; pertama bentuk perkongsian HP antara pihak toko HP Peunayong dengan distributor, yaitu pihak toko HP membeli HP dari distributor secara tidak tunai. Kedua yaitu bentuk perkongsian antara pemilik toko HP dengan karyawan. Dalam bentuk ini setelah HP dibeli dari distributor maka pihak toko HP/pemilik toko menjual HP tersebut secara bersama-sama dengan keuntungan dalam penjualan yang ditentukan masing-masing pihak toko. Perkongsian jual beli HP di toko HP Peunayong ditinjau menurut akad *syirkah*, apabila dilihat dari bentuk kerja sama antara pemilik toko HP dan distributor terhadap pembelian HP dengan sistem pembayaran tidak tunai berdasarkan modal kepercayaan yang diberikan pihak distributor, kemudian pemilik toko HP berkerja sama dengan karyawan toko HP di Peunayong untuk menjual kembali HP tersebut secara tunai, maka implementasi akad *syirkah* dalam perkongsian ini dapat digolongkan kepada akad *syirkah wujuh*. Perkongsian jual beli HP di toko HP Peunayong sudah sesuai dengan akad *syirkah*, namun dalam hal pertanggungansan risiko di antara pemilik toko HP dan karyawan ketika terjadi masalah atau kerugian belum sesuai dengan akad *syirkah wujuh*, karena kesalahan atau kerugian yang dilakukan tidak ditanggung secara bersama melainkan siapa yang melakukan kesalahan atau memberatkan salah satu pihak. Sedangkan dalam *syirkah wujuh* pada dasarnya *syirkah wujuh* adalah akad timbal balik dimana pihak yang berkerja menjadi penjamin dan wakil bersamaan. Sehingga dalam pertanggungansan resiko bila salah satu pihak berkerja dan rugi berarti pihak lain juga ikut bertanggung jawab.⁷

Skripsi tahun 2018 oleh Isna Affifah yang berjudul “Implikasi Akad *Syirkah* Terhadap Monetisasi Youtube Atas Bagi Hasil Google Adsense Perspektif Hukum Islam (studi kasus pada Channel YouTobe “adam benny”). Di dalam

⁷ Putri Adlilla “Implementasi Akad *Syirkah* dalam Perkongsian Jual Beli HP (Suatu Penelitian di Toko HP Peunayong), Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.

skripsi ini membahas tentang “Implikasi Akad *Syirkah* Terhadap Monetisasi Youtube Atas Bagi Hasil Google Adsense Perspektif Hukum Islam (studi kasus pada Channel YouTube “adam benny”), Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, karena penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu objek tertentu. Peneliti menggunakan landasan teori *syirkah* sebagai acuan dalam melakukan penelitian. Dari hasil penelitian yang didapat, peneliti menyimpulkan bahwa 1. Dampak yang ditimbulkan dari Google Adsense adalah dampak positif yang berupa meningkatkan kreativitas dan menghasilkan income, dan dampak negatifnya berupa ketidakjelasan dalam penentuan bagi hasil, maka implikasi akad *syirkah* sangat dibutuhkan untuk mengetahui apakah perjanjian kerja sama tersebut sesuai dengan hukum Islam atau tidak, sehingga tidak menimbulkan banyak dampak negatif, 2. Penentuan bagi hasil Google AdSense pada channel YouTube “Adam Benny” belum sesuai dengan hukum Islam, karena masih adanya unsur *gharar* atau ketidakjelasan, sehingga YouTuber tidak mengetahui persentase yang didapat selama satu bulan.⁸

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan kepada responden.⁹ Dalam hal ini penelitian langsung melakukan pengamatan bagi hasil dalam ternak ayam pelung di Kelurahan Pasir Gintung dan menggunakan penelitian pustaka sebagai bahan referensi

⁸ Isna Affifah, “Implikasi Akad *Syirkah* Terhadap Monetisasi Youtube Atas Bagi Hasil Google Adsense Perspektif Hukum Islam (studi kasus pada Channel YouTube “adam benny”), Skripsi, IAIN Salatiga, 2018.

⁹ Susiadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung : Permatanet, 2014). h. 10.

dalam melakukan penelitian dengan menggunakan literatur yang terdapat di perpustakaan.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan perihail yang terkait dengan sistematis fakta-fakta dan karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara fakta dan cermat. Data yang dikumpulkan berupa gambaran, dan bukan angka-angka.¹⁰ Dalam hal ini peneliti akan mendeskripsikan penelitian yang terkait dengan pelaksanaan bagi hasil dalam ternak ayam pelung di Kelurahan Pasir Gintung.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data lapangan, data yang digunakan sebagai berikut :

a. Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti dari hasil pertanyaan wawancara.¹¹ Adapun sumber data primernya yaitu hasil dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Yang menjadi objek penelitian diantaranya orang yang terlibat langsung dalam proses bagi hasil.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang tersusun sudah dijadikan dalam bentuk dokumen-dokumen. Adapun sumber data sekundernya yaitu buku-buku yang terkait dengan bagi hasil dalam ternak ayam pelung, fiqh muamalah, al-qur'an dan Hadist.

3. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

¹⁰ Ibid, h.6.

¹¹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 30.

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹² Adapun penelitian ini mengambil dari satu kelurahan yaitu Kelurahan Pasir Gintung. Kelurahan Pasir Gintung hanya terdapat satu peternak ayam pelung, jadi penelitian ini termasuk penelitian populasi yang terdiri dari 5 orang yaitu 1 pemilik, 2 pengelola, 1 admin, 1 pengantar pesanan ayam ke wilayah tertentu.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹³ Wawancara ini dilakukan oleh peneliti kepada pihak yang terlibat dalam pengelolaan ternak ayam pelung di Kelurahan Pasir Gintung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung pada tanggal 05 Desember 2020 dengan pihak pemilik, pengelola, admin, dan pengantar pesanan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui dokumen tertulis dalam penelitian, kemudian data-data yang sudah didapat melalui dokumen-dokumen tersebut, kemudian dikumpulkan dan diolah secara relevan dengan objek penelitian.¹⁴

5. Metode Pengolahan Data

Dalam proses pengolahan data dari penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa cara, antara lain :

- a. Pemeriksaan data (*editing*) Proses ini merupakan teknik pemeriksaan data dengan cara meneliti ulang data yang diperoleh. Kaitannya dengan tahap ini yang peneliti lakukan adalah mengkaji ulang hasil dari wawancara

¹² Sugiono, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2017), h. 80.

¹³ Cholid Nurbuko dan Abu Achmad, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, cet.8, 2007), h. 83.

¹⁴ Ibid., h. 143

dan observasi penelitian dengan menggunakan teknik *editing* dari data yang diperoleh.¹⁵

- b. Sistematika data (*sistemazing*) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika pokok bahasan dan sub pokok bahasan berdasarkan urutan masalah.¹⁶

6. Analisis Data

Metode analisa data merupakan kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda dan mengkategorikannya sehingga dapat diperoleh temuan berdasarkan fokus masalah yang ingin dijawab. Pada analisa data diuraikan proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip-transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain agar peneliti dapat mengkajikan temuannya. Setelah data terkumpul semua maka proses selanjutnya yaitu mengambil kesimpulan dari data yang sudah terkumpul, dengan menggunakan metode analisa dan kualitatif yang artinya data yang berupa pendapat sehingga tidak berupa angka, tetapi berupa kata atau kalimat.¹⁷

Metode berfikir dalam penulisan yaitu metode induktif, metode induktif adalah metode yang mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan suatu gejala atau kaidah-kaidah di lapangan yang umum mengenai fenomena yang diselidiki.¹⁸ Adapun cara berfikir menggunakan metode induktif ini, peneliti mengamati atau menyelidiki, mewawancarai secara lisan untuk mendapatkan informasi-informasi, serta mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan objek penelitian, kemudian peneliti menganalisis objek penelitian menggunakan landasan teori.

¹⁵ Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian* (Bogor : Ghalia Indonesia), 2002

¹⁶ Abdul Muhammad, *Metode Penelitian Hukum dan Cara Pendekatan Masalah*, (Lampung) Penerbit Fakultas Hukum Unila, 2002),h. 15

¹⁷ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), h. 191.

¹⁸ Ibid., h. 4.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab dan dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Bab pertama, berisi Pendahuluan yang meliputi: penegasan judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan Sub-Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian terdahulu yang Relevan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua berisi tentang Landasan Teori yang akan digunakan peneliti untuk menganalisis suatu objek permasalahan didalam skripsi ini yaitu Landasan Teori tentang Akad dan *Syirkah*, meliputi pengertian Akad dan *Syirkah*, dasar hukum Akad *Syirkah*, Rukun dan Syarat Akad *Syirkah*, Asas-Asas *Syirkah*, dan Batalnya Akad *Syirkah*.

Bab ketiga berisi deskripsi objek penelitian yang terdiri dari gambaran umum objek yang terdiri dari Gambaran Umum Kelurahan Pasir Gantung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung dan Penyajian Fakta dan Data Penelitian tentang Sistem pelaksanaan bagi hasil dalam ternak ayam pelung Di Kelurahan Pasir Gantung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung.

Bab keempat berisi tentang Analisis Penelitian, yaitu Analisis pelaksanaan bagi hasil dalam ternak ayam pelung Di Kelurahan Pasir Gantung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung menggunakan landasan teori yang terdapat pada bab dua, dan analisis hukum Islam tentang pelaksanaan bagi hasil dalam ternak ayam pelung di Kelurahan Pasir Gantung, Kecamatan Tanjung Karang Pusat dan terakhir yaitu, Bab kelima berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan, dan saran-saran yang relevan dengan penelitian ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Akad

Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip definisi yang dituliskan oleh Al-Shanhury, akad ialah “perikatan ijab qabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan kerelaan antara kedua belah pihak”. Adapula yang mendefinisikan, akad sebagai ikatan ataupun penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak.¹

Berdasarkan pengertian diatas akad merupakan perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan keridhoan diantara kedua belah pihak atau lebih, disertai dengan kekuatan hukum yang mengikat sehingga memberikan pengaruh pada suatu kontrak, atau segala perkataan yang keluar dari lisan seorang manusia dengan kehendaknya dan syara’ serta menetapkan hak dan kewajiban diantara yang berkontrak.

2. Dasar Hukum Akad

Dasar hukum dibolehkannya seseorang melakukan akad terdapat dalam firman Allah SWT, yaitu dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah : 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...^٢

“apabila kamu bermua’amalah secara tunai dan waktu yang di tentukan hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seseorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar” (Q.S. Al-Baqarah: 282).

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), h. 15.

3. Rukun dan Syarat Akad

1) Rukun-rukun Aqad

a. *'Aqid*

'aqid merupakan orang yang berakad (subjek akad), yang terdiri dari satu orang atau lebih, misalnya pemilik kebun nanas memberii pekerjaan kepada seseorang yang bisa merawat kebun nanas dengan akad atau perjanjian bahwa hasil dalam merawat kebun nanas tersebut akan dibagi sama rata sesuai dengan kesepakatan bersama.

b. *Ma'qud Alaih*

Ma'qud Alaih merupakan benda-benda yang dapat diakadkan (objek akad), seperti benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah, akad gadai.

c. *Maudhu' al-'Aqid*

Maudhu' al-'Aqid merupakan tujuan dalam melakukan akad. Jika akad yang digunakan berbeda maka berbedalah tujuan pokok akadnya. Misalnya dalam akad jual beli tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan di beri ganti sebagai bentuk nilai tukarnya.

d. *Shigat al-aqd*

Shigat al-aqd merupakan ijab dan qabul. Ijab ialah perkataan pertama yang dikeluarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan qabul ialah pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak kedua untuk menerimanya. Berdasarkan pengertian tersebut ijab qabul ialah pernyataan atau ucapan seseorang yang dapat dituangkan dalam bentuk tulisan ataupun lisan yang dibuktikan dengan adanya perbuatan.²

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 46.

Dalam ijab qabul terdapat beberapa syarat yang wajib di penuhi, ulama fiqh menuliskannya sebagai berikut :

- a) Adanya kejelasan maksud antara kedua belah pihak, misalnya : “Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau pemberian”.
- b) Adanya kesesuaian antara ijab dan qabul.
- c) Adanya satu majelis akad dan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, yang tidak menunjukkan penolakan dan pembatalan dari keduanya.
- d) Menggambarkan kesungguhan dan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, yang tidak mengandung unsur keterpaksaan, tidak diancam ataupun ditakut-takuti oleh orang lain.

Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad. Beberapa cara yang diungkapkan dari para ulama fiqh dalam berakad, yaitu :

1. Dengan cara tulisan (kitabah), misalnya dua ‘aqid berjauhan tempatnya, maka ijab qabul boleh dengan kitabah atas dasar inilah para ulama membuat kaidah : “Tulisan itu sama dengan ucapan”.
2. Isyarat, bagi orang-orang tertentu akad tidak dapat dilaksanakan dengan ucapan ataupun tulisan, misalnya seseorang yang bisu tidak dapat mengadakan ijab qabul dengan tulisan. Maka orang yang bisu dan tidak pandai baca tulis tidak dapat melakukan ijab qabul dengan ucapan dan tulisan. Dengan demikian, qabul atau akad dilakukan dengan isyarat. Berdasarkan kaidah sebagai berikut : “isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah”.³

³ Ibid, h. 47.

2) Syarat-Syarat Akad

Syarat-syarat dalam akad sebagai berikut :

- a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Apabila tidak cakap bertindak maka tidak sah akadnya.
- b. Sesuatu yang diakad kan ada ketika akad, apabila melakukan akad terhadap sesuatu yang tidak ada, maka tidak sah. Misalnya jual beli buah-buahan masih dalam putik. Akan tetapi para fuqaha' mengecualikan ketentuan ini untuk ada *salam*, *ijarah*, *hibah*, dan *istishna'*, meskipun barangnya belum ada ketika akad. Akadnya sah karena dibutuhkan manusia.
- c. Objek akad dapat diakui oleh syara'. Untuk objek akad disyaratkan berbentuk harta, dimiliki seseorang, dan bernilai harta menurut syara' oleh sebab itu, jika objek akad itu tidak bernilai harta dalam Islam, maka akadnya tidak sah, seperti khamar (minuman keras).
- d. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses transaksi. Oleh sebab itu, menurut Mustafa Ahmad az-Zuqra' majelis tersebut bisa berbentuk tempat dilangsungkannya akad dan proses berlangsungnya akad.
- e. Pernyataan ijab tetap berjalan dan shahih sampai terjadinya qabul. Apabila ijab tidak berjalan dan shahih lagi ketika qabul diucapkan, maka akad itu tidak sah.
- f. Akad dapat memberikan manfaat, baik manfaat berupa materi ataupun immateri, artinya jelas kegunaan yang terkandung dari sesuatu yang diakadkan.
- g. Tujuan akad itu jelas dan diakui syara', tujuan akad ini berkaitan erat dengan berbagai bentuk akad yang dilakukan. Misalnya, dalam jual beli tujuannya adalah untuk memindahkan hak milik penjual kepada pembeli dengan imbalan.

- h. Akad yang dilakukan tersebut memenuhi syarat-syarat khusus yang berkaitan dengan yang diakadkan.⁴

4. Macam-macam Akad

Setelah dijelaskan syarat-syarat akad, pada bagian ini akan dijelaskan macam macam akad :

1. '*Aqad Munjiz* merupakan akad yang dilaksanakan secara langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
2. '*Aqad Mualaq* merupakan akad yang didalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan dalam penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.
3. '*Aqad Mudhaf* merupakan akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penangguhan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, akan tetapi belum mempunyai hukum sebelum tiba waktu yang telah ditentukan.⁵

5. Berakhirnya Akad

Akad dapat berakhir apabila disebabkan oleh beberapa hal di antaranya sebagai berikut :

- a. Berakhirnya masa berlaku akad, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat diantara pihak yang berakad.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat berakhir jika :
 - 1) Jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
 - 2) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat.

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pertama, 2007), h. 101.

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 50-51.

- 3) Akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak secara sempurna.
- 4) Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.⁶

6. Hikmah Akad

Akad yang dilakukan oleh manusia sudah pasti memiliki hikmah, diantara hikmah tersebut, yaitu :

- a) Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi.
- b) Dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian tidak sembarangan, karena telah mengetahui bahwa dalam Islam ikatan perjanjian diatur secara syar'i.
- c) Akad merupakan “payung hukum” di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat ataupun memilikinya.⁷

B. Syirkah

1. Pengertian Syirkah

Secara bahasa *syirkah* berarti *al-ikhtilat* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan. Seperti persekutuan hak milik atau perserikatan usaha.⁸ Yang dimaksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.⁹

Secara terminologis, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Syirkah (musyarakah)* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam satu pemodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.¹⁰ Ulama

⁶ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 61-62.

⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta : Pustaka Kencana, 2010), h. 51.

⁸ Ghufroon A Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 191.

⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta : PT. Hidakarya Agung, 1998), h. 196.

¹⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta, : Kencana, 2012), h. 220.

mazhab beragam pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain :

a. Ulama Hanafiah

Menurut ulama hanafiah, *syirkah* adalah ungkapan tentang adanya transaksi akad antara dua orang atau lebih yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan.

b. Ulama Malikiyah

Menurut ulama malikiyah perkongsian adalah izin untuk mendayagunakan (*tasharuf*) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun keduanya masing-masing mempunyai hak untuk bertasharuf.

c. Ulama Syafi'iyah

Menurut ulama syafi'iyah, *Syirkah* adalah ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki seseorang atau lebih dengan cara yang masyur (diketahui).

d. Ulama Hanabilah

Menurut ulama' hanabilah, *Syirkah* adalah perhimpunan hak (kewenangan) atau pengolahan harta (*tasharuf*).¹¹

Setelah diketahui definisi-definisi *syirkah* menurut para ulama, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.¹² Pada dasarnya definisi-definisi yang dikemukakan para ulama fiqih diatas hanya berbeda secara redaksional, sedangkan esensi yang terkandung di dalamnya adalah sama, yaitu ikatan kerjasama yang dilakukan dua orang atau lebih dalam perdagangan atau usaha. Pelaksanaan akad *syirkah* yang telah disepakati kedua belah pihak, maka berhak

185. ¹¹ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), h.

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 127.

bertindak hukum terhadap harta serikat itu, dan berhak mendapat keuntungan sesuai dengan kesepakatan diawal.¹³

2. Dasar Hukum Syirkah

a. Al-Qur'an

Dasar perserikatan dibolehkan, menurut para ulama fiqh, berdasarkan firman Allah SWT, dalam surat As-Shaad 38:24 yang berbunyi :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
الْخُطَاآءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۖ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ
رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٣٨﴾



Daud berkata : "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya , dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh dan amat sedikitlah mereka ini, dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhanya lalu menyungkur sujud dan bertaubat". (Q.S. As-Shaad 38:24)

Dan didalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ

"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran". (Q.S. Al-Maidah (5):2).

¹³ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 166.

b. Hadis

Menurut hadist yang diriwayatkan oleh Abu Daud,
 “Dari Abu Hurairah RA. Berkata :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَالَ
 "اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيعَتَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا
 رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Dari Abu Hurairah r.a. beliau berkata: Rasulullah pernah bersabda Allah telah berfirman: “Aku menemani dua orang yang bermitrausaha selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati yang lain. Bila salah seorang berkhianat, maka Aku akan keluar dari kemitrausahaan mereka”. (HR. Abu Daud)

Maksud dari hadits diatas, sesungguhnya Allah bersama keduanya, yaitu bersama keduanya dalam penjagaan, bimbingan dan bantuan dengan pertolongan-Nya terhadap keduanya. Dalam hadits tersebut terdapat anjuran kerjasama tanpa pengkhianatan dan peringatan keras terhadap orang yang bersekutu terhadap pengkhianatan itu.¹⁴

c. Ijma'

Masyarakat arab telah menjadikan *syirkah* sebagai bagian dari usaha jauh sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul, para ulama bersepakat bahwa tidak ada yang menolak legitimasi *syirkah*. Para ulama berijma' mengenai bolehnya hal ini, hanya saja mereka berbeda pendapat dalam jenis-jenisnya.¹⁵

3. Rukun dan Syarat *Syirkah*

Sebagai sebuah perjanjian, *syirkah* atau perserikatan harus memenuhi segala rukun dan syaratnya agar perjanjian

¹⁴ Abu Dawud, Sulaiman bin al-Asy'ab as-Sajstaani, Sunan Abu Dawud, Beirut-Libanon: Daar al-Fikr, 1994, juz 3, h. 226.

¹⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2004 edisi ke-2), h. 186.

tersebut sah dan mempunyai akibat hukum seperti undang-undang bagi pihak-pihak yang mengadakannya.

1. Rukun *Syirkah*

Rukun *syirkah* adalah sesuatu yang harus ada ketika *syirkah* itu berlangsung. Ada perbedaan pendapat terkait dengan rukun *syirkah*. Menurut ulama Hanafiyah rukun *syirkah* hanya ada dua yaitu ijab (ungkapan penawaran melakukan perserikatan) dan kabul (ungkapan penerimaan perserikatan). Adapun menurut Abdurrahman al-Jaziri rukun *syirkah* meliputi dua orang yang berserikat, ijab kabul, objek akad *syirkah* baik itu berupa harta maupun kerja.¹⁶

Adapun yang menjadi rukun *syirkah* menurut ketentuan syariat Islam adalah sebagai berikut¹⁷:

- a. Ijab kabul Ijab kabul pada hakikatnya adalah kemauan para pihak untuk mengadakan serikat atau kerja sama dalam menjalankan suatu kegiatan usaha.
- b. Orang (pihak-pihak yang mengadakan serikat) Orang yang akan mengadakan perjanjian perserikatan harus memenuhi syarat yaitu, bahwa masing-masing pihak yang hendak mengadakan *syirkah* ini harus sudah dewasa (*balig*), sehat akalunya, dan atas kehendaknya sendiri.
- c. Pokok Pekerjaan (bidang usaha yang dijalankan) Setiap perserikatan harus memiliki tujuan dan kerangka kerja (frame work) yang jelas, serta dibenarkan menurut *syara*'. Untuk menjalankan pokok pekerjaan ini tentu saja pihak-pihak yang ada harus memasukkan barang modal atau saham yang telah ditentukan jumlahnya.

Rukun *syirkah* menurut Sayyid Sabiq yaitu adanya ijab dan kabul. Maka sah dan tidaknya *syirkah*

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 129.

¹⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Konsep, Regulasi, dan Implementasi), (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), h. 119.

tergantung pada ijab dan kabulnya.¹⁸ Maka dalam hal ini *syirkah* dapat dilaksanakan dengan catatan syarat-syarat *syirkah* terpenuhi.

2. Syarat *Syirkah*

Adapun syarat *syirkah* merupakan perkara penting yang harus ada sebelum dilaksanakan *syirkah*. Jika syarat tidak terwujud maka transaksi *syirkah* batal. Menurut Hanafiyah syarat-syarat *syirkah* terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

- a. Syarat yang berkaitan dengan semua bentuk *syirkah* baik harta maupun lainnya. Dalam hal ini, terdapat dua syarat: pertama, berkaitan dengan benda yang diakadkan (ditransaksikan) harus berupa benda yang dapat diterima sebagai perwakilan. Kedua, berkaitan dengan keuntungan, pembagiannya harus jelas dan disepakati oleh kedua belah pihak.¹⁹
- b. Syarat yang berkaitan dengan *syirkah mal* (harta). Dalam hal ini ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu pertama modal yang dijadikan objek akad *syirkah* adalah dari alat pembayaran yang sah seperti riyal, rupiah, dan dolar. Kedua, adanya pokok harta (modal) ketika akad berlangsung baik jumlahnya sama atau berbeda.
- c. Sesuatu yang bertalian dengan *syirkah mufawadah*, bahwa dalam hal *mufawadah* disyaratkan, yang pertama modal (pokok harta) dalam *syirkah mufawadah* harus sama. Kedua, bagi yang bersyirkah ahli untuk kafalah. Ketiga, yang dijadikan objek akad disyaratkan *syirkah* umum, yaitu pada semua macam jual beli atau perdagangan.²⁰
- d. Adapun syarat yang bertalian dengan *syirkah inan* sama dengan syarat-syarat *syirkah mufawadāh*.

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al Ma'arif, 1987), h. 195.

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 129.

²⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h.128.

Adapun menurut Fatwa DSN-MUI No: 114/DSN-MUI/IX/2017 dijelaskan terkait rukun dan syarat *syirkah*, yaitu²¹:

1. Dalam ijab kabul, akad *syirkah* harus dinyatakan secara tegas, jelas, mudah dipahami dan dimengerti, serta diterima oleh para mitra. Serta akad *syirkah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undang yang berlaku.
2. *Syarik* (mitra) boleh berupa orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian *syarik* (mitra) wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mitra wajib memiliki harta yang disertakan sebagai modal usaha (*ras al-mal*) serta memiliki keahlian atau keterampilan usaha.
3. Usaha yang dilakukan mitra harus usaha yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Macam-macam *Syirkah*

Secara garis besar, *syirkah* terbagi kedalam dua bentuk, yaitu *syirkah al-amlak* dan *syirkah al-Uqud* (perserikatan yang dibentuk melalui akad).

- a. *Syirkah al-amlak*, yaitu dua orang atau lebih yang memiliki benda akan tetapi tidak menggunakan akad *syirkah*.²² *Syirkah* ini terbagi menjadi dua bentuk :
 1. *Syirkah Ikhtariyah*, yaitu persekutuan yang terjadi atas perbuatan dan kehendak pihak-pihak yang berserikat. Misalnya dua orang yang bersepakat membeli suatu barang atau mereka menerima harta hibah dari orang lain dan menjadi milik mereka secara berserikat. Dalam kasus seperti ini, harta

²¹ Fatwa DSN-MUI No: 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Syirkah*.

²² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 167.

yang dibeli bersama atau dihibahkan menjadi harta serikat bagi mereka berdua.²³ Dalam hal ini, barang yang dibeli, dihadiahkan atau diwasiatkan tersebut menjadi barang kongsi antara mereka berdua.

2. *Syirkah Jabariyah*, yaitu *syirkah* yang timbul dari dua orang atau lebih tanpa perbuatan diantara keduanya. Misalnya dua orang atau lebih menerima harta warisan maka para ahli waris berserikat memiliki harta warisan secara otomatis tanpa usaha atau akad.²⁴

Hukum kedua jenis perkongsian ini adalah salah seorang yang bersekutu seolah-olah sebagai orang lain dihadapan orang yang bersekutu lainnya. Oleh karena itu, salah seorang diantara mereka tidak boleh mengolah (*tasharruf*) harta perkongsian tersebut tanpa izin dari teman sekutunya, karena keduanya tidak mempunyai wewenang untuk menentukan bagian masing-masing.²⁵

b. *Syirkah al-'Uqud*

Syirkah al-uqud adalah syarikat yang akadnya disepakati oleh dua orang atau lebih untuk bekerjasama dan merekapun sepakat untuk berbagi keuntungan dan kerugian. *Syirkah al-,uqud* atau sering disebut contractual partnership dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi dalam keuntungan dan resiko. Perjanjian yang dimaksud tidak perlu merupakan suatu perjanjian formal (tertulis), dapat saja perjanjian itu informal (secara lisan). Namun sebaiknya perjanjian *syirkah al-uqud* itu diformalisasikan dalam suatu perjanjian tertulis dengan disaksikan oleh para saksi yang memenuhi syarat. Pada pembagian

²³ Azharudin Lathif, *Fiqh Mumalat*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), h.

²⁴ Ibid, h. 130.

²⁵ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 187.

syirkah al-,uqud terdapat perbedaan pendapat diantara ulama-ulama fiqh. Sedangkan yang lebih sering dipakai adalah pendapat dari ulama Syafi'iyah dan Malikiyah, yang membagi *syirkah* kedalam empat bentuk, yaitu :

1) *Syirkah 'Inan*, adalah kesepakatan dua orang atau lebih untuk menyerahkan harta mereka masing-masing supaya memperoleh hasil dengan cara mengolah harta itu, bagi setiap yang berserikat memperoleh bagian yang ditentukan dari keuntungan. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam bekerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati antara mereka. Namun, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil berbeda sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan bagian dari kerugian yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan besarnya modal yang ditanamkan. Para ulama fiqh bersepakat bahwa bentuk perserikatan seperti ini adalah boleh.²⁶

2) *Syirkah Mufawadhah*, adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih, di mana setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama.²⁷ Menurut Sayyid Sabiq, syarat *syirkah mufawadhah* adalah sebagai berikut:

- a) Modalnya harus sama banyak. Bila ada diantara anggota persyarikatan modalnya lebih besar, maka *syirkah* itu tidak sah.
- b) Mempunyai wewenang untuk bertindak, yang ada kaitannya dengan hukum Satu agama, sesama muslim, tidak sah bersyarikat dengan non muslim.
- c) Masing-masing pihak mempunyai hak untuk

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 130.

²⁷ Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: gema Insani, 2001), h. 92.

bertindak atas nama *syirkah* (kerjasama)²⁸

Dengan demikian, syarat utama dari jenis *syirkah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.

- 3) *Syirkah Abdan* atau *A'mal*, yaitu kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerjasama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau kerjasama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor.²⁹ Pada *syirkah* ini yang terpenting adalah pembagian kerja atas dasar keahlian masing-masing sesuai kesepakatan. Ketidakjelasan pembagian kerja dapat menimbulkan perselisihan dikemudian hari terutama dalam hal pembagian keuntungan.
- 4) *Syirkah Wujud*, yaitu serikat yang dilakukan dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali, dan mereka melakukan suatu pembelian dengan bayar tangguh serta menjualnya dengan tunai, sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi bersama. Di zaman sekarang, perserikatan ini mirip makelar dan banyak dilakukan orang. Dalam perserikatan seperti ini, pihak yang berserikat membeli barang secara tangguh, hanya atas dasar suatu kepercayaan, kemudian barang tersebut mereka jual dengan harga tunai, sehingga mereka meraih keuntungan.³⁰ Ulama Hambaliyah membagi bentuk *syirkah* menjadi 5 (lima) bentuk. Keempat bentuk *syirkah* yang dijelaskan di atas dan yang kelima adalah :
- 5) *Syirkah Mudharabah*, yaitu persetujuan antara pemilik modal dengan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam perdagangan ataupun

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Kairo: Maktabah al-Khidmat al-Haditsah, 1407 H 1986 M, jilid tiga), h. 379.

²⁹ Ibid, h. 92.

³⁰ Azharudin Lathif, *Fiqh Muamalat*, h. 133 .

bidang tertentu yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama; sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggungan pemilik modal saja. Menurut ulama Hanabilah, yang menganggap al-mudharabah termasuk salah satu bentuk perserikatan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam perserikatan ini. Syarat-syarat itu adalah: (a) pihak-pihak yang bertindak cakap bertindak sebagai wakil; (b) modalnya berbentuk uang tunai; (c) jumlah modal jelas; (d) diserahkan langsung kepada pekerja (pengelola) dagang itu setelah akad itu disetujui; (e) pembagian keuntungan dinyatakan secara jelas pada waktu akad; dan (f) pembagian keuntungan diambil dari hasil perserikatan itu, bukan dari harta lain. Akan tetapi menurut ulama (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Zahiriyah, Syi'ah Imamiyah), tidak memasukkan transaksi mudharabah kedalam bentuk perserikatan, karena mudharabah, menurut mereka, merupakan akad tersendiri dalam bentuk kerjasama lain, dan tidak dinamakan dengan perserikatan.³¹

5. Pembagian Keuntungan dan Kerugian dalam *Syirkah*

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Syirkah* dijelaskan bahwa:

1. Keuntungan Nisbah Bagi Hasil

- a. Sistem atau metode pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad.
- b. Nisbah boleh disepakati dalam nisbah proporsional atau dalam bentuk nisbah kesepakatan.
- c. Nisbah sebagaimana angka 2 dinyatakan dalam bentuk angka persentase terhadap keuntungan dan tidak boleh dalam bentuk nominal atau angka persentase dari modal usaha.
- d. Nisbah kesepakatan sebagaimana angka 2 tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan

³¹ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah.*, h. 172.

keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu mitra atau mitra tertentu.

e. Nisbah kesepakatan boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah (berjenjang atau tiering).

f. Nisbah kesepakatan boleh diubah sesuai kesepakatan.³²

2. Ketentuan Keuntungan (*Al-Ribh*), kerugian (*al-Khasarah*) dan Pembagiannya

a. Keuntungan usaha *syirkah* harus dihitung dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.

b. Seluruh keuntungan usaha *syirkah* harus dibagikan berdasarkan nisbah proporsional atau nisbah kesepakatan, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan ditentukan di awal yang ditetapkan hanya untuk syarik tertentu.

c. Salah satu *syarik* boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau persentase itu diberikan kepadanya.

d. Keuntungan usaha (*ar-ribh*) boleh dibagikan sekaligus pada saat berakhirnya akad atau secara bertahap sesuai kesepakatan dalam akad.

e. Kerugian usaha *syirkah* wajib ditanggung (menjadi beban) para syarik secara proporsional sesuai dengan porsi modal usaha yang disertakannya.

f. Dalam *syirkah abdan* dan *syirkah wujuh* wajib dicantumkan komitmen para syarik untuk menanggung risiko/kerugian dalam porsi yang sama atau porsi yang berbeda dengan nisbah bagi hasil yang berbentuk nisbah kepercayaan.

6. Asas-Asas Muamalah

Dalam muamalah harus dilandasi beberapa asas, karena tanpa asas ini, suatu tindakan tidak dinamakan

³² Fatwa DSN-MUI No: 114/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Syirkah*.

sebagai muamalah, asas muamalah terdiri dari³³:

1. Asas *'adalah* (keadilan) atau pemerataan adalah penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang bertujuan agar harta tidak hanya dikuasai oleh segelintir orang saja, tetapi harus didistribusikan secara merata di antara masyarakat.
2. Asas *Mu'awanah*, mewajibkan seluruh muslim untuk tolong menolong dan membuat kemitraan dengan melakukan muamalah, yang dimaksud dengan kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.
3. Asas *musyarakah*, menghendaki bahwa setiap bentuk muamalah kerja sama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat, melainkan bagi keseluruhan masyarakat, oleh karena itu ada harta yang dalam muamalah diperlakukan sebagai milik bersama dan sama sekali tidak dibenarkan dimiliki perorangan.
4. Asas *manfa'ah* (*tabaddulul manafi'*), yang berarti bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak yang terlibat.
5. Asas *antaradhin* atau suka sama suka, menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing.
6. Asas *'adamul gharar*, yang berarti bahwa pada setiap bentuk muamalah tidak boleh ada *gharar* atau tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya sehingga mengakibatkan hilangnya unsur kerelaan salah satu pihak dalam melakukan suatu transaksi.
7. Kebebasan membuat akad, merupakan prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis

³³ Abdul Munib, "Hukum Islam dan Muamalah (Asas-Asas Hukum Islam dalam Bidang Muamalah), Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman, Vol. 5 No. 1, Fakultas Agama Islam UIM Pamekasan, Februari 2018, h. 74-75.

apapun tanpa terikat pada nama-nama yang telah ditentukan dalam UndangUndang Syari'ah dan memasukkan klausul apa saja dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta bersama dengan jalan batil.

8. *Al-musawah* (kesetaraan atau kesamaan), artinya bahwa setiap pihak pelaku muamalah berkedudukan sama.
9. *Ash-siddiq*, dalam muamalah kejujuran dan kebenaran harus dikedepankan, perjanjian yang di dalamnya terdapat unsur kebohongan menjadi batal atau tidak sah.

7. Batalnya Akad Syirkah

Batalnya akad syirkah sebagai berikut:

1. Mencapai kurun waktu yang ditentukan (ditetapkan). Hal ini merupakan masa (lamanya) waktu akad syirkah yang ditetapkan kedua belah pihak.
2. Salah satu pihak meninggal dunia. Hal ini dapat juga termasuk pihak yang melarikan diri.
3. Salah satu pihak menghendaki penghentian syirkah. Hal ini menurut ahli fikih bahwa perserikatan itu tidak bersifat mengikat (mutlak), sehingga ia boleh dibatalkan.
4. Terjadi pelanggaran yang menyebabkan syirkah tidak sah lagi, seperti salah satu pihak berkhianat atau melanggar kesepakatan yang dibuat bersama.
5. Salah satu pihak hilang kecakapannya dalam bertindak hukum, seperti gila terus menerus.³⁴

³⁴ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1996), jilid ke-4, h. 368.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

Depatemen Agama RI, *Al-Qura'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Diponegoro, 2008.

Dapertemen RI, *Al-Qua'an dan Terjemahannya* Bandung: CV Ponogoro, 2000.

Buku:

Arikunto Suharsimi, *Prosedur Suatu Pendekatan Pratik*, Jakarta: Rineka Cipta 19991

Angraini Reni, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Tanaman Pertanian, Studi kasus di Desa Gunung Agung Tengah Kecamatan Sempo Utara Pagar Alam*. Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Patah Palembang, 2017.

Achmad Abu, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, cet 8, 2007.

Abd. Rahman Ghazaly, M,A , *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana 2010.

Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Tentang Teori Akad Dalam Fiqh Muamalat* Jakarts: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Abdul Rahmlan Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.

Az-Zuhaily Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* Libanon: Dar al-Fikr, 1984.

Al-Juzairi, S. A, *Fiqh Empat Mazhab*, jilid 4 Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.

- A. Mas'adi Ghufroon *Fiqh Muamalah Kontesktual* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Bukhari Shahih, Terjemahan Hadist, Jakarta: Wijaya, 1992.
- Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Balai Pustaka, 2003.
- Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2011
- Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalat, Yogyakarta : Pustaka Kencana, 2010.
- Hasabah Ali, *Ushul al-Tasyri' al-Islami*, Mesir: Dar al-Ma'rif, 1981
- Hidayat Enang, *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2016.
- Ja'far Khumedi A, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 1994.
- Ja'far Khumedi A, *Hukum Perdata Islam*, Bandar Lampung: Permatenet Publishing, 2016,
- Muhamad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, Jakarta ; PT Interpramata Mandiri, 2015.
- Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Cotra Aditya bakti, 2004.
- Muhammad Abdullah dan Ibrahim Mahmud, *Ensiklopedia Fiqh Muamalah Dalam Pandangan Empat Mazhab* Yogyakarta: Maktabah Al-Hanafi, 2009.

- Mana Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri, 2004
- Masroen Hasrun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 4(Cet. VI, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve 2003.
- Mardani, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Kencana, 2012.
- Prasetyo Yoyok, *Ekonomi Syari'ah*, Bandung: Penerbit Aria Mandiri Group, 2018.
- Rozalinda, *Fikh Ekonomi Syariah*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016.
- Rohmaniyah Wasilatur, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Cetakan pertama,: Jakarta, 2019.
- Rozalinda, M. Ag, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Subagyo Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Pratik*, Jakarta: PT Renaka Cipta, 1994.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta.
- Suhendi H, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syarifudin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana. 2003.
- Syehk Muhammad Yusuf Qardawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, Jakarta: PT. Bina Ilmu, 2001.
- Syafe'I, ma Rachamd, *Fiqh Muamalat* Cet. II, Bandung: Pustaka Setia, 2004..
- Winarsih Mulyo, *Pengaruh Muzara'ah Terhadap Tingkat Pendapatan Masyarakat Kalisapu Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Jawa Tengah*, Skripsi Diterbitkan, Jurusan Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta. 2008.

Zainal Asikin Zainal dan Amirudin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Zuhaily Wahbah, *Al-Fiqih Islam wa Adilatuhi*, Terjemahan. Abdul Hayyie al-kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Jurnal:

Angraini Reni ,*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Tanaman Pertanian, Studi kasus di Desa Gunung Agung Tengah Kecamatan Sempo Utara Pagar Alam*. Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Patah Palembang, 2017.

Winarsih Mulyono, *pengaruh Muzara'ah terhadap tingkat Pendapatan Masyarakat Kalisapu Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal Jawa Tengah*, Skripsi Diterbitkan , Jurusan Syari'ah dan Hukum Syarif Hidayatullah Jakarta 2008.

Muhammad Rafly, *Muzara'ah Perjanjian Bercocok Tanam Lahan Pertanian Menurut Kajian Hukum Islam*, di Desa Alur Nyamuk Kecamatan Birem Bayeun, *Jurnal Hukum*, Vol. II No. 2 Juli 2016.

Ribh-Ar, *Penerapan Prinsip Muzara'ah Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Jagung di Sulawesi Selatan*, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No.2 Oktober 2019.

Wawancara:

Ardi Nata, “Juru Tulis di Desa Wayutong”, *Wawancara*, 23 desember 2020.

Ardi Nata, “Juru Tulis di Desa Wayutong”, *Wawancara*, 28 Desember 2020.

Arya, “salah satu masyarakat Desa Wayutong”, kecamatan Lemong kabupaten Pesisir Barat, *Wawancara*, 2 Januari 2021.

- Anto, “salah satu pengelola kebun cengkeh di Desa Wayutong”, kecamatan Lemong, kabupaten, Pesisir Barat, *Wawancara*, 29 Desember 2020.
- Basirwan, “dengan pemilik kebun cengkeh di Desa Wayutong”, kecamatan Lemong, kabupaten PesisirBarat, *Wawancara*, 27 Desember 2020.
- Bahraini, “Kepala Adat di Desa Wayutong”, *Wawancara*, 24 Desember 2020.
- Khoiron, “salah satu pengelola kebun cengkeh di Desa Wayutong”, kecamatan Lemong, kabupaten Pesisir Barat, *Wawancara*, 1 Januari 2021.
- Fauzulah Bangsawan, “Kepala Desa Wayutong”, *Wawancara*, 20 Desember 2020.
- Faizullah Bangsawan, “Kepala Desa Wayutong”, *Wawancara*, 21 Desember 2020.
- Profil Desa Wayutong pada tahun 2019, di catat pada tanggal 15 Februari 2020, 18 April 2020.
- Muzakir, “salah satu pengelola kebun cengkeh di Desa Wayutong”, kecamatan Lemong, kabupaten Pesisir Barat, *Wawancara*, 25 Desember 2020
- Muzakir, “salah satu pengelola kebun cengkeh di Desa Wayutong”, kecamatan Lemong, kabupaten Pesisir Barat, *Wawancara*, 30 Desember 2020.
- Muzakir, “salah satu pengelola kebun cengkeh di Desa Wayutong”, kecamatan Lemong, kabupaten Pesisir Barat, *Wawancara*, 18 Desember 2020.
- Wawancara dengan beberapa pengelola kebun cengkeh di Desa Wayutong, kecamatan Lemong, kabupaten, Pesisir Barat, *Wawancara*, 31 Desember 2020.